

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN	1
SURAT PERNYATAAN KEPALA PUSKESMAS.....	2
SURAT PERSETUJUAN LAPORAN AUDIT	3
SURAT PERNYATAAN IZIN CETAK	4
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	5
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024.....	6
Laporan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024.....	7
Laporan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023	8
Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	9
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	10
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Gambaran Umum	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	
Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Operasional	

*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Kota Pekalongan

Telepon (0285) 420962 SMS Gateway 085878616865

e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

Kepada Yth.

AP Idjang Soetikno

Kantor Akuntan Publik *I. Soetikno*

Jl Durian Raya No A3 Perum Durian Mediterania Villa Banyumanik

Semarang

Kami memberikan representasi ini sehubungan dengan audit Saudara atas Laporan Keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Tahun 2024 yang ditujukan untuk menyatakan apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan surplus/defisit dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut ini telah kami buat kepada Saudara selama audit Saudara :

1. Laporan keuangan yang disebut diatas disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Kami telah menyediakan kepada Saudara semua catatan akuntansi dan data lain yang berkaitan.
3. Tidak ada transaksi material yang belum dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan.
4. Tidak terdapat transaksi material yang tidak secara semestinya dicatat dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan.
5. Kami tidak memiliki rencana atau maksud yang dapat berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.
6. Tidak ada ;
 - a. Kecurangan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern
 - b. Kecurangan yang melibatkan karyawan lain yang dapat berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan
7. Tidak terdapat kemungkinan unsur tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berdampak harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Kami telah mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, termasuk ketentuan perpajakan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan lain yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan serta peraturan terkait lainnya.

Menurut pengetahuan dan keyakinan kami, tidak ada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut.

Pekalongan, 26 Maret 2025

Kepala Puskesmas



Aswina Azis Michroza
NIP. 19810824 200902 1 001

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN***

***SURAT PERNYATAAN KEPALA
PUSKESMAS***



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Kota Pekalongan
Telepon (0285) 420962 SMS Gateway 085878616865
e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor : Jl. Hoscokroaminoto NO. 347 Pekalongan Selatan
Alamat rumah
sesuai KTP : Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No. 295 Kel. Pasirkratonkramat
Kec.Pekalongan Barat
Jabatan : Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa :

Saya setuju untuk memberikan informasi atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa,
dengan melampirkan Foto Kপি KTP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2025

Kepala Puskesmas


METERAI
TEMPEL
BDAMX118479322
Aswina 'Azis Michroza
NIP. 198108242009021001

*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

SURAT PERSETUJUAN LAPORAN AUDIT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Kota Pekalongan
Telepon (0285) 420962 SMS Gateway 085878616865
e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN
LAPORAN KEUANGAN AUDITED
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

"UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN"

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor : Jl. Hosokroaminoto NO. 347 Pekalongan Selatan
Alamat rumah
sesuai KTP : Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No. 295 Kel. Pasirkratonkramat
Kec.Pekalongan Barat
Jabatan : Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa :

Pihak Manajemen telah memeriksa dan menyetujui seluruh Draft Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diajukan oleh KAP I Soetikno. Kesalahan setelah proses cetak final Laporan Auditor Independen tidak dapat diubah dan menjadi tanggung jawab Pihak Manajemen sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2025

Kepala Puskesmas


Aswina 'Azis Michroza
NIP: 19810824 200902 1 001

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN***

SURAT IZIN CETAK LAPORAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Kota Pekalongan
Telepon (0285) 420962 SMS Gateway 085878616865
e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN
IZIN CETAK ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor : Jl. Hosokroaminoto NO. 347 Pekalongan Selatan
Alamat rumah
sesuai KTP : Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No. 295 Kel. Pasirkratonkramat
Kec.Pekalongan Barat
Jabatan : Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa:

Pihak Manajemen mengizinkan KAP I. Soetikno untuk mencetak laporan keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan serta lampirannya, untuk periode/tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 1 (Satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan izin cetak ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2025

Kepala Puskesmas



Aswina 'Azis Michroza

*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor : 00014/2.0393/AU.5/11/0370-1/1/III/2025

Kepada Yth.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan

Jl. HOS Cokroaminoto No. 347

Kota Pekalongan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor lain, dengan laporan auditor independen nomor : 00101/2.0604/AU.5/11/0430-4/1/III/2024 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian tanggal 30 Maret 2024.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang

dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

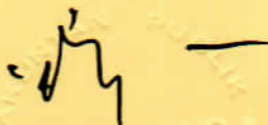
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
" I. SOETIKNO "



Drs. Idjang Soetikno, MM, Akt, CA, CPA
No. Reg. AP. 0370

Semarang, 26 Maret 2025



***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN***

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023
<u>PENDAPATAN</u>		
Pendapatan jasa layanan	2.010.030.663,00	2.127.634.729,00
Pendapatan hasil kerja sama	2.880.000,00	3.295.000,00
Pendapatan hibah	-	-
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	897.782,00	428.947,00
Pendapatan APBD	770.532.045,00	1.015.070.000,00
Jumlah Pendapatan	2.784.340.490,00	3.146.428.676,00
<u>BELANJA</u>		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	673.772.735,00	753.747.617,00
Belanja Barang dan Jasa	2.176.011.943,00	2.176.937.687,00
Belanja Lain-Lain	-	-
Jumlah Belanja Operasi	2.849.784.678,00	2.930.685.304,00
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	122.763.275,00	164.100.500,00
Jumlah Belanja Modal	122.763.275,00	164.100.500,00
Jumlah Belanja	2.972.547.953,00	3.094.785.804,00
SURPLUS/DEFISIT LRA	- 188.207.463,00	51.642.872,00
<u>PEMBIAYAAN</u>		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
SiLPA Lalu	321.045.729,00	269.402.857,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Setoran ke Kas Daerah	-	-
Pembiayaan Netto	321.045.729,00	269.402.857,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	132.838.266,00	321.045.729,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	321.045.729,00	269.402.857,00
Penggunaan SAL	-	-
Subtotal	321.045.729,00	269.402.857,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	(188.207.463,00)	51.642.872,00
Subtotal	132.838.266,00	321.045.729,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	132.838.266,00	321.045.729,00

Catatan :
Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 132.838.266,00 terdiri dari :
a. Kas BLUD di Bank Jateng sebesar Rp 79.542.888,00
b. Kas BOK di BNI sebesar Rp 53.295.378,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NERACA

Per 31 Desember 2024

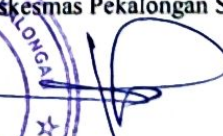
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2a,3	132.838.266,00	321.045.729,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2b,4	25.985.000,00	25.575.000,00
Penyisihan Piutang	2c,5	- 129.925,00	- 127.875,00
Persediaan	2d,6	192.197.405,58	219.722.265,06
Jumlah Aset Lancar		350.890.746,58	566.215.119,06
ASET TETAP	2e,7		
Tanah		1.193.000.000,00	1.193.000.000,00
Peralatan dan Mesin		5.087.934.038,76	4.513.149.515,62
Gedung dan Bangunan		5.099.297.969,74	5.099.297.969,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan		733.086.767,00	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya		457.500,00	457.500,00
Akm. Penyusutan Aset Tetap		- 4.958.204.389,76	- 4.534.121.099,62
Jumlah Aset Tetap		7.155.571.885,74	7.004.870.652,74
ASET LAINNYA	2e,8		
Aset Lain-Lain - Aset Rusak		101.974.458,00	171.774.089,99
Akumulasi Aset Rusak		- 89.873.565,00	- 159.673.196,99
Jumlah Aset Lainnya		12.100.893,00	12.100.893,00
TOTAL ASET		7.518.563.525,32	7.583.186.664,80
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.2,9		
Utang Belanja		68.612.705,00	139.535.196,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		68.612.705,00	139.535.196,00
EKUITAS			
Ekuitas		7.449.950.820,32	7.443.651.468,80
Jumlah Ekuitas		7.449.950.820,32	7.443.651.468,80
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.518.563.525,32	7.583.186.664,80

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Disetujui
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan


dr. Aswina Azis Michroza
NIP. 198108242009021000



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN - LO			
Pendapatan jasa layanan	2.3,10	2.010.568.538,00	2.128.165.579,00
Pendapatan antar entitas akuntansi dan pelaporan	2.3,11	1.360.713.338,00	1.316.498.161,96
Pendapatan hasil kerja sama	2.3,13	2.880.000,00	3.295.000,00
Pendapatan hibah	2.3,12	-	-
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	2.3,14	897.782,00	428.947,00
Pendapatan APBD	2.3,15	770.532.045,00	1.015.070.000,00
Jumlah Pendapatan Operasional		4.145.591.703,00	4.463.457.687,96
BEBAN OPERASIONAL			
Belanja Pegawai	2.4,16	666.134.023,00	729.743.208,00
Belanja Barang dan Jasa	2.4,17	2.989.838.361,70	3.053.998.685,93
Beban Penyisihan Piutang	2.4,19	129.925,00	127.875,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.4,18	349.051.011,00	130.456.437,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.4,18	101.799.792,00	101.799.792,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.4,18	24.361.212,00	24.407.049,00
Jumlah Beban Operasional		4.131.314.324,70	4.040.533.046,93
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN		14.277.378,30	422.924.641,03

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Disetujui

Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan



dr. Aswina 'Azis Michroza

NIP. 198108242009021000

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	7.443.651.468,80	6.832.026.958,77
Surplus/Defisit-LO	14.277.378,30	422.924.641,03
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas - Koreksi Kurang Lebih DINKES	- 0,30	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Rusak Usang		-
Koreksi Ekuitas Ekstrakom DINKES		1.186.777,00
Koreksi Ekuitas - Transfer Persediaan Antar OPD		-
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 7.978.026,48	279.866.008,17
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		- 92.352.916,17
Koreksi Ekuitas - Persediaan Transfer	-	-
Ekuitas Akhir	7.449.950.820,32	7.443.651.468,80

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	2.010.030.663,00	2.127.634.729,00
Pendapatan hasil kerja sama	2.880.000,00	3.295.000,00
Pendapatan hibah	-	-
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah	897.782,00	428.947,00
Pendapatan APBD/APBN	770.532.045,00	1.015.070.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.784.340.490,00	3.146.428.676,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran pegawai	673.772.735,00	753.747.617,00
Pembayaran Barang dan jasa	2.176.011.943,00	2.176.937.687,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.849.784.678,00	2.930.685.304,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	- 65.444.188,00	215.743.372,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	122.763.275,00	164.100.500,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	122.763.275,00	164.100.500,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	- 122.763.275,00	- 164.100.500,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.928.448,00	61.046.936,00
Jumlah Arus Masuk Kas	87.928.448,00	61.046.936,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.928.448,00	61.046.936,00
Jumlah Arus Keluar Kas	87.928.448,00	61.046.936,00
Arus Kas Bersih sari Aktivitas Transitirosis	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	- 188.207.463,00	51.642.872,00
Saldo Awal Kas Setasra Kas BLUD	321.045.729,00	269.402.857,00
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	132.838.266,00	321.045.729,00

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN***

***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024***

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

1. URAIAN SINGKAT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

a. Gambaran Umum

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merupakan Unit Desa Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Soko Duwet. Sejak tahun 2013, UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan PPKBLUD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 Tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa pada tanggal 01 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu pada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka Puskesmas Kota Pekalongan harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, *benefit*, dan *cost* harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan pola pengelolaan BLUD secara mandiri sejak bulan Januari 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 440/1205 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan. Pola pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas Pekalongan Selatan merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Visi, Misi dan Motto Puskesmas Pekalongan Selatan

Visi : "Mewujudkan Wilayah Puskesmas Pekalongan Selatan yang Lebih Sehat, Mandiri dan Sejahtera."

1. Mengoptimalkan peran lintas sektor dan lintas program dalam program pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Bersinergi bersama masyarakat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
3. Memberikan layanan kesehatan dengan tenaga yang profesional dan berkualitas dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
4. Membuat data kesehatan yang akuntabel sebagai acuan penyusunan program kesehatan.

Motto : "Yang Terbaik Setiap Saat"

c. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai, dan untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang serta uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0004 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0783 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan surat keputusan kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penetapan Struktur Organisasi Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Aswina 'Azis Michroza	Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan
2.	Evi Nur Afida, S.KM	Pelaksana Tata Usaha
3.	Tisyana Fibrianti, S.ST.	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Puskesmas
4.	Nur Rachmawati, AMK	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

5.	dr. Rizki Murtrinda	Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Mardiyah, S.Kep.Ns	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas
7.	Dwi Kurnia Hadi, AMK	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan
8.	dr. Kartika Dwi Kurniasari	Penanggung Jawab Mutu

d. Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian

Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

b. Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut: **a) Kas dan Setara Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

- 1) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- 2) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang biaya yang diterbitkan.
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
 - Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
 - Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- 3) Pengakuan Piutang:

- Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
 - Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- 4) Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria:
- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - Jumlah piutang dapat diukur;
 - Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun - 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	>2 tahun - 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh
dengan memproduksi sendiri; - Nilai wajar

apabila diperoleh dengan lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3) Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- 4) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis, peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

e) Aset Tetap

Aset tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan instalasi; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; dan akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap:

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset

tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penugasan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; - Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan; - Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap

- a) Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- b) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dan penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) Untuk utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan/atau akan diterima.
- d) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah:

- a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah:

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal diterbitkannya SKPD tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap, belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja:

Belanja diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
- Terjadinya pengeluaran kas
Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk pembayaran gaji pegawai, membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- Koreksi atas belanja
Termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal

- a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dijual.

- 3) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan/atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 5) Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan/atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang/jasa.
- c) Belanja Hibah
- 1) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - 2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
 - 3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- d) Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - 2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.

- 3) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - 4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- e) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun beban direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

f) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

g) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut:

- a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
- b) Beban diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs nilai tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

- Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dilakukan dalam pendapatan lain-lain.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
PENJELASAN POS - POS NERACA DAN LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3 KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Bank Jateng BLUD Rek. 3-007-25226-8	79.542.888,00	205.531.774,00
- Bank Jateng BOK Rek. 3-007-25458-9	-	-
- Bank BNI BOK Rek. 1590074639	53.295.378,00	115.513.955,00
Jumlah	132.838.266,00	321.045.729,00

4 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang sah per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang RITP	13.000.000,00	-
Piutang RJTP	12.985.000,00	-
Piutang BPJS Non Kapitasi	-	25.400.000,00
Piutang Klinik	-	175.000,00
Jumlah	25.985.000,00	25.575.000,00

Tagihan BPJS yang Telah Terverifikasi

Bulan Pelayanan	Jumlah klaim	Tgl Verif	Tgl Bayar
Desember 2024	13.000.000,00	16/01/2025	22/01/2025
Desember 2024	12.985.000,00	16/01/2025	22/01/2025
Jumlah	25.985.000,00		

5 PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	129.925,00	127.875,00
Jumlah	129.925,00	127.875,00

KETERANGAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2024	UMUR PIUTANG	PERSENTASE	PENYISIHAN PIUTANG
Jumlah Piutang	25.985.000,00	< 1 Tahun	0,5%	129.925,00
		1 s/d 2 Tahun	10,0%	
		2 s/d 5 Tahun	50,0%	
		> 5 Tahun	100,0%	
Jumlah	25.985.000,00			129.925,00

6 PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan Alat Tulis Kantor	131.400,00	50.400,00
Persediaan Kertas Dan Cover	325.500,00	305.500,00
Persediaan Bahan Cetak	108.000,00	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.022.324,00	-
Persediaan Bahan Komputer	80.000,00	80.000,00
Persediaan Perabot Kantor Persediaan	3.321.000,00	6.869.500,00
Perlengkapan Dinas	450.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.256.850,00	6.799.850,00
Persediaan Obat	65.789.267,00	133.017.798,66
Persediaan Obat-Obatan Lainnya	110.163.164,58	72.499.316,40
Persediaan Natura	2.450.000,00	-
Persediaan Suku Cabang Alat Kedokteran	99.900,00	99.900,00
Jumlah Persediaan	192.197.405,58	219.722.265,06

KETERANGAN	SALDO AWAL	KENAIKAN	PENURUNAN	SALDO AKHIR
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	2.452.300,00	2.452.300,00	-
Bahan Kimia	-	290.000,00	290.000,00	-
Bahan Bakar dan Pelumas	-	34.854.028,00	34.854.028,00	-
Bahan Baku	-	356.000,00	356.000,00	-
Isi Tabung Gas	-	345.000,00	345.000,00	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	99.900,00	176.500,00	176.500,00	99.900,00
Suku Cadang Alat Pertanian	-	980.000,00	980.000,00	-
Alat Tulis Kantor	50.400,00	9.472.200,00	9.391.200,00	131.400,00
Kertas dan Cover	305.500,00	16.501.000,00	16.481.000,00	325.500,00
Bahan Cetak	-	7.027.000,00	6.919.000,00	108.000,00
Benda Pos	-	1.204.000,00	1.204.000,00	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	29.819.104,00	27.796.780,00	2.022.324,00
Bahan Komputer	80.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	80.000,00
Perabot Kantor	6.869.500,00	43.455.854,00	47.004.354,00	3.321.000,00
Alat Listrik	-	8.520.200,00	8.520.200,00	-
Perlengkapan Dinas	-	450.000,00	-	450.000,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	1.440.000,00	1.440.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.799.850,00	23.768.666,00	23.311.666,00	7.256.850,00
Obat	133.017.798,66	637.578.150,31	704.806.681,97	65.789.267,00
Obat-Obatan Lainnya	72.499.316,40	210.174.028,91	172.510.180,73	110.163.164,58
Natura	-	143.660.500,00	141.210.500,00	2.450.000,00
Natura dan Pakan Lainnya	-	232.942.000,00	232.942.000,00	-
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	75.000,00	75.000,00	-
Jumlah	219.722.265,06	1.407.967.531,22	1.435.492.390,70	192.197.405,58

Catatan :

- a. Kenaikan sebesar 1.407.967.531,22 terdiri dari pembelian dan transfer dari DINKES, dengan rincian sebagai berikut :
b. Pembelian persediaan BLUD & BOK sebesar Rp. 558.382.193,00
c. Transfer masuk persediaan sebesar Rp. 849.585.338,22 berasal dari DINKES

- a. Penurunan sebesar 1.435.492.390,70 adalah beban tahun berjalan dam persediaan usang
b. Beban Persediaan BLUD & BOK sebesar 1.435.182.672,72
c. Beban Persediaan Usang berupa obat dan obat-obatan lainnya sebesar 309.717,98

7 ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

2024				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
- Tanah	1.193.000.000,00	-	-	1.193.000.000,00
- Peralatan dan Mesin	4.513.149.515,62	633.891.275,00	59.106.751,86	5.087.934.038,76
- Gedung dan Bangunan	5.099.297.969,74	-	-	5.099.297.969,74
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	733.086.767,00	-	-	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya	457.500,00	-	-	457.500,00
Jumlah	11.538.991.752,36	633.891.275,00	59.106.751,86	12.113.776.275,50
Akumulasi Penyusutan				
- Gedung dan Bangunan	896.358.582,00	101.799.792,00	-	998.158.374,00
- Peralatan dan Mesin	3.447.267.493,62	357.029.038,00	59.106.751,86	3.745.189.779,76
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	190.495.024,00	24.361.212,00	-	214.856.236,00
Jumlah	4.534.121.099,62	483.190.042,00	59.106.751,86	(4.958.204.389,76)
Nilai Buku	16.073.112.851,98	1.117.081.317,00	-	7.155.571.885,74

Catatan :

- a. Kenaikan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 633.891.275,00 terdiri dari belanja modal sebesar Rp 122.763.275,00 dan transfer dari SKPD/UPB lain sebesar Rp 511.128.000,00
b. Penurunan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 59.106.751,86 terdiri dari reklas KIB sebesar Rp 49.481.751,86 dan transfer ke luar SKPD/UPB lain sebesar Rp 9.625.000,86
c. Kenaikan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 101.799.792,00 merupakan beban penyusutan tahun 2024
d. Kenaikan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 357.029.038,00 terdiri dari beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp 349.051.011,00 dan koreksi tambah sebesar Rp 7.978.027,00
e. Kenaikan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 24.361.212,00 merupakan beban penyusutan tahun 2024

2023				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
- Tanah	1.193.000.000,00	-	-	1.193.000.000,00
- Peralatan dan Mesin	3.978.480.786,61	710.042.819,00	175.374.090	4.513.149.515,62
- gedung dan Bangunan	5.099.297.969,74	-	-	5.099.297.969,74
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	733.086.767,00	-	-	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya	457.500,00	-	-	457.500,00
Jumlah	11.004.323.023,35	710.042.819,00	175.374.089,99	11.538.991.752,36
Akumulasi Penyusutan				
- Gedung dan Bangunan	865.985.324,00	101.799.792,00	71.426.534,00	896.358.582,00
- Peralatan dan Mesin	3.574.419.007,61	194.066.759,00	321.218.272,99	3.447.267.493,62
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	185.226.903,00	24.407.049,00	19.138.928,00	190.495.024,00
Jumlah	4.625.631.234,61	320.273.600,00	411.783.734,99	(4.534.121.099,62)
Nilai Buku				7.004.870.652,74

8 ASET LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lain-lain - Aset Rusak	101.974.458,00	171.774.089,99
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	- 89.873.565,00	(159.673.196,99)
Jumlah	12.100.893,00	12.100.893,00

9 KEWAJIBAN

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang Belanja Pegawai		
Hutang yang Masih Harus Dibayar - Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN	35.482.926,00	33.101.324,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar - Jasa Pelayanan Non PNS	-	79.723.154,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar - Biaya Manajemen	10.081.317,00	21.824.804,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar - Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.746.745,00	1.206.676,00
Jaminan Kesehatan PPPK	300.476,00	117.372,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	78.717,00	84.566,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	1.630.000,00	1.070.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	2.010.300,00	1.977.450,00
Utang Belanja Jasa Kantor - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	429.850,00	429.850,00
Utang Belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan bagi Non ASN	1.915.794,00	-
Utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi Non ASN	13.936.580,00	-
Jumlah	68.612.705,00	139.535.196,00

10 PENDAPATAN JASA LAYANAN

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari kegiatan operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Layanan Umum	208.101.000,00	246.668.000,00
BPJS Kesehatan - Kapitasi	1.463.902.538,00	1.483.840.729,00
BPJS Kesehatan - Non Kapitasi	338.565.000,00	397.656.850,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	2.010.568.538,00	2.128.165.579,00

11 PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Jumlah tersebut merupakan penerimaan dari entitas akuntansi/pelaporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Dropping- Persediaan	849.585.338,00	770.555.842,96
Pendapatan Dropping - Aset Tetap	511.128.000,00	545.942.319,00
Jumlah	1.360.713.338,00	1.316.498.161,96

12 PENDAPATAN HIBAH - LO

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah	-	-
Jumlah	-	-

13 PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hasil kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hasil Kerjasama - Parkir	2.880.000,00	3.120.000,00
Pendapatan Hasil Kerjasama - Praktik Klinik Mahasiswa	-	175.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	2.880.000,00	3.295.000,00

14 LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain BLUD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bunga Bank	247.407	428.947,00
Pendapatan Lainnya	522.500	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	127.875	-
Jumlah	897.782	428.947,00

15 PENDAPATAN APBD/APBN

Jumlah tersebut merupakan pendapatan atas dana BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan BOK	770.532.045,00	1.015.070.000,00
Jumlah	770.532.045,00	1.015.070.000,00

16 BEBAN PEGAWAI

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	87.658.349,00	563.273.552
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	16.469.900
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	117.372
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	149.882.384
Beban Pegawai BLUD	578.475.674,00	-
Jumlah	666.134.023,00	729.743.208,00

17 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.452.300,00	4.800.400,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	290.000,00	48.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.854.028,00	23.111.948,00
Beban Bahan-Bahan Baku	356.000,00	40.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	665.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	345.000,00	1.325.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	176.500,00	916.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	980.000,00	75.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	8.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.391.200,00	17.330.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.481.000,00	15.535.810,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.919.000,00	6.983.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.204.000,00	1.497.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	27.796.780,00	50.703.835,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.426.000,00	1.244.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.004.354,00	28.158.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.520.200,00	5.935.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.440.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.311.666,00	18.945.066,00
Beban Obat-Obatan-Obat	704.806.681,97	545.391.282,76
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	172.510.180,73	239.102.571,17
Beban Natura dan Pakan- Natura	141.210.500,00	14.823.415,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	232.942.000,00	491.361.500,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	75.000,00	160.000,00
Beban Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Lainnya	-	2.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	-	6.000,00
Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	1.615.000,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	1.057.098.896,00	1.066.285.705,00
Jumlah	2.492.591.286,70	2.536.069.932,93

Beban Jasa Kantor

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	4.000.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim	-	- ,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	58.106.273,00	79.723.154,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	- ,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	- ,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	-	- ,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	-	- ,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	- ,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	- ,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,serta Alat Rumah Tangga	-	- ,00
Beban Jasa Kalibrasi	-	14.443.240,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	-	- ,00
Beban Tagihan Telepon	-	84.566,00
Beban Tagihan Air	-	1.070.000,00
Beban Tagihan Listrik	-	1.977.450,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	10.029.850,00
Beban Paket/Pengiriman	-	- ,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	- ,00
Jumlah	60.506.273,00	111.328.260,00

Beban Premi Asuransi

Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	23.562.456,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	25.747.945,00
Jumlah	-	49.310.401,00

Beban Kursus Singkat/Pelatihan

Beban Kursus Singkat/Pelatihan	702.000,00	-
Jumlah	702.000,00	-

Beban Pemeliharaan**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	1.745.000,00	350.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	9.110.802,00	6.680.166,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	847.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.662.500,00	350.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruma Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.543.500,00	7.275.600,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.375.000,00	-
Beban Pemeliharaan-Alat Pemadam Kebakaran	-	174.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	777.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	6.028.650,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.545.000,00	1.575.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.765.000,00	1.797.500,00
Jumlah	26.593.802,00	25.007.916,00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	27.401.000,00	57.735.050,00
Jumlah	27.401.000,00	57.735.050,00

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	-	10.830.000,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.110.000,00	1.689.000,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	-	3.315.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.664.000,00	2.803.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-	220.000,00

Jumlah	3.774.000,00	18.857.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	57.768.802,00	101.599.966,00

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.810.000,00	2.370.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	183.310.000,00	135.400.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	189.150.000,00	158.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Luar Kota	-	3.843.750,00
Jumlah	378.270.000,00	300.213.750,00

Beban Lainnya

Jumlah tersebut merupakan beban lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Ekstrakomptable	-	4.786.777,00
Jumlah	-	4.786.777,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.989.838.361,70	3.053.998.685,93

18 BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	349.051.011,00	130.456.437,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.799.792,00	101.799.792,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.361.212,00	24.407.049,00
Jumlah	475.212.015,00	256.663.278,00

19 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang	129.925,00	127.875,00
Jumlah	129.925,00	127.875,00

20 TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggungjawab atas penyelesaian laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang diselesaikan tanggal 17 Maret 2025.